

## Meningkatkan Mutu Pendidikan Indonesia melalui Pengembangan Sistem Kolaborasi Penelitian Antar Lembaga

π **Prof. Dr. Bambang Suwarno, MA**  
(FPIPS IKIP Bandung)

Paling tidak hingga dekade 1980 sebagian besar dari kegiatan pendidikan tinggi (PT), termasuk LPTK, masih banyak yang belum terjamah oleh prinsip keilmuan atau sains sejati. Kegiatan demi kegiatan masih diselenggarakan secara tradisional, bahkan sering juga dilaksanakan secara spontan sesuai dengan sikon: *desakan dan kebutuhan sesaat*. Dalam literatur tentang PT seringkali ditemukan adu argumen tetapi sedikit fakta yang dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi *siapa* yang mengklaim *apa*. Penelitian-penelitian empiris yang dilakukan di masa lalu kebanyakan masih terpusat pada berbagai kegiatan yang bersifat *ad hoc* dan lokal terpisah dari landasan teori yang sistematis, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat generalisasi.

Salah satu sebab terjadinya stagnasi ini adalah belum terjalinnya hubungan harmonis diantara para peneliti dengan *policy maker* atau *decision maker*, dan para praktisi pendidikan. Ketiga komunitas tersebut masih enggan berdialog secara terbuka tentang bagaimana menata dunia pendidikan melalui penelitian-penelitian supaya menjadi lebih baik. Dalam pertemuan-pertemuan formal, seperti seminar, lokakarya, konvensi, atau semacam itu, yang umumnya membahas atau mendiskusikan tentang kondisi dan perkembangan pendidikan di Indonesia secara umum, nampaknya mereka akrab. Tetapi demikian kembali ke komunitasnya, masing-masing masih tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti sedia kala, yakni terus bekerja dalam konteks yang berbeda, dan kurang memiliki kesamaan pendapat tentang bagaimana mentransformasikan pendidikan.

Mereka beroperasi dalam dunia yang bergerak dan berubah-ubah, tetapi mereka juga terus berupaya memecahkan berbagai persoalan yang timbul dan menyangkut bidang pendidikan --- sejalan dengan falsafah dan versinya masing-masing. Gambaran tentang ketidakharmonisan diantara ketiga komunitas tersebut bilamana berlanjut akan sangat merugikan dunia pendidikan kita.

Indonesia pada tahun 2003 sudah akan memasuki era globalisasi – era yang penuh tantangan dan perubahan. Pada saat itu Indonesia sudah akan memasuki era perdagangan bebas AFTA – *Asean Free Trade Area* – yang akan diikuti dengan AFIA -- *Asean Free Investment Area*, dan AFLA – *Asean Free Labor*. Oleh karena itu sejak dini Indonesia harus memusatkan perhatian pada peningkatan mutu SDM. Untuk itu seluruh potensi para ahli yang ada harus digerakkan ke arah itu bila Indonesia ingin menang dalam persaingan dan tetap *survive*. Para ilmuwan (peneliti), para praktisi pendidikan, dan para *policy maker* atau *decision makers*, harus mulai menyatukan tekad untuk mencurahkan segala kemampuan mereka dalam upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan Indonesia. Diharapkan ketiga komunitas yang hingga kini masih saja belum dapat bekerja sama secara harmonis sudah harus mulai berkolaborasi sebagai mitra berdiskusi atau berdialog guna menyatukan visi mereka tentang bagaimana mencari jalan terbaik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kita.

Pada beberapa tahun terakhir ini, dunia pendidikan Indonesia mulai mendapat perhatian dan menjadi objek pemikiran dan

penelitian, meskipun level dan scope-nya masih terbatas. Sejumlah ahli ilmu-ilmu sosial mulai berkolaborasi dengan para ahli penelitian yang telah mapan untuk melakukan penelitian bersama tentang pendidikan di Indonesia. Kerjasama tersebut telah memberikan perspektif baru yang lebih segar tentang proses pendidikan di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi dan tentang konsepsi-konsepsi '*disciplines*' mereka.

Sayang sekali bahwa upaya kolaborasi seperti itu baru terlaksana di lingkungan *terbatas*, terutama pada level (tingkat) PT -- antar PT negeri, antara PT negeri dan PT swasta. Di samping itu, masih ada bentuk kemitraan atau kolaborasi lain yang diwadahi dalam lembaga-lembaga swadaya dan lembaga-lembaga di bawah yayasan-yayasan yang bekerja sebagai agen jasa perantara (semacam '*brokerage*': CIDES, CSIS, CPIS, CPS, dll) dengan tugas menganalisis informasi dari berbagai sumber, termasuk hasil-hasil penelitian pihak ketiga (data sekunder) atau penelitian yang dilakukan oleh lembaga tsb (data primer), yang dibutuhkan untuk konsumsi para *policy makers* atau *decision makers* dari berbagai instansi atau departemen.

Hasil-hasil analisis kemudian disajikan dengan bahasa sederhana tetapi komunikatif tanpa mengurangi '*aspek-aspek ilmiahnya*'. Kolaborasi yang terjalin sifatnya bisa sementara dapat juga semi permanen, tergantung variasi dan karakteristik dari informasi yang diperlukan. Salah satu contoh adalah apa yang dilaksanakan oleh '*Central for Policy and Implementation Studies*' (CPIS) yang mewadahi bentuk kolaborasi atau kemitraan, di mana di dalamnya terkumpul para ahli dan profesional dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai PT (dalam dan luar negeri), dengan tujuan utama memberi masukan bagi *policy makers* atau *decision makers*. Namun demikian sebagaimana telah disinggung di atas, kegiatan-kegiatan seperti itu *belum merambah* ke level yang lebih rendah, seperti misalnya pada sistem pendidikan sekolah dasar dan menengah

(Kanwil/Kandep/Kancam) padahal justru pada level inilah sekarang sedang mengalami proses reformasi dan transformasi sangat cepat. Jika ada kerja sama antara PT (LPTK) dengan sistem sekolah dasar dan menengah umumnya masih terbatas dalam bentuk kegiatan proyek-proyek yang sifatnya sementara, dan itupun terjadi karena peraturan proyek mengharuskan begitu.

Berbagai metode sebenarnya sudah sering disampaikan dalam seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya atau *in-service training* bidang penelitian, yakni dalam upaya mengatasi hambatan bahasa dan menciptakan reseptivitas yang lebih baik tentang hasil-hasil penelitian. Namun upaya tersebut nampaknya kurang efektif, ini terbukti dari lambatnya respons-respons inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil penelitian. Diduga penyebabnya adalah belum terjalin kerja sama dalam bentuk kemitraan atau sistem kolaborasi yang efektif. Para manager sekolah, manakala menghadapi kegiatan yang sifatnya kolaboratif, seperti misalnya *in-service training* atau lokakarya *biasanya* hanya melibatkan individu-individu -- kepala sekolah atau guru -- tertentu saja, sedangkan kerja sama antar staf pengajar, tidak digalakkan. Hal seperti ini juga sering terjadi di negara-negara yang sudah maju belasan tahun yang lalu, sebagaimana dikatakan oleh Brickell (1961) yang melaporkan bahwa staf pengajar di College telah mengalami '*utter futility in equipping teachers with skills which were not needed or not wanted in the elementary and secondary schools in which those teachers subsequently went to work*'. Ia mengatakan sebagai penyebabnya adalah '*local community tradition, the accustomed ways of existing staff, and the attitude of the administrators*'. Teknik-teknik yang diajarkan dalam rangka *in-service training* penelitian hanya dapat mencapai sebagian kecil guru-guru, umumnya mereka hanya memiliki dasar pengetahuan dan teknik penelitian yang masih samar-samar. Mengingat keterbatasan berbagai metode diseminasi, beberapa ahli menempatkan harapannya pada

hasil-hasil cetakan. Namun demikian, dari pengalaman di masa lalu ternyata publikasi hasil-hasil penelitian juga gagal memberi pengaruh terhadap sekolah-sekolah. Di Amerika Serikat misalnya, suatu penelitian (suvey) dengan sample yang representative menemukan bahwa hanya sekitar 1% saja diantara guru-guru yang membaca Bulletin pendidikan atau Jurnal penelitian. Hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Mungkin, untuk sementara, publikasi hasil-hasil penelitian minimal harus sampai ke administrator atau manager sekolah.

### **Berbagai kecenderungan, tantangan, isu dan masalah yang dihadapi dalam pengembangan kolaborasi**

Sudah lama kita ketahui bahwa para praktisi dan para peneliti pendidikan berbicara dalam bahasa yang berbeda. Masing-masing mempunyai jargon-jargon pendidikan yang tidak diragukan lagi dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Keadaan seperti ini adalah sebagai konsekuensi dari kurang harmonisnya hubungan ketiga komunitas sebagai telah disinggung di atas. Pada bagian ini akan disinggung serba sedikit persepsi masing-masing komunitas tentang fungsi dan tugas-tugasnya.

*Peneliti pendidikan:* Peneliti pendidikan bertugas mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi tentang berbagai isu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan harapan bahwa hasil-hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan dalam menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan yang akan diterapkan di sekolah-sekolah. Tetapi dalam kenyataan, harapan tersebut sering tidak terlaksana, karena para pengambil kebijakan merasa bahwa hasil-hasil penelitian mereka tidak atau kurang mendukung kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirancang. Para praktisi pendidikan umumnya tidak tertarik kepada hasil-hasil penelitian, bahkan mereka enggan menerapkan metode-metode baru yang belum diujicobakan di sekolahnya. Para peneliti pendidikan harus menyadari bahwa

masalah *waktu dan perkembangan yang terjadi dalam dunia sosial dan politik* sangat penting bagi para pembuat kebijakan. Pada saat seperti itulah biasanya para pembuat kebijakan memerlukan informasi yang dapat mendukung proposal yang diajukan.

*Pembuat kebijakan :* Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pendidikan? Di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh jajarannya (Dirjen, Sekjen, Kanwil, Kandep, Kancam) adalah pemegang kekuasaan dan yang berhak mengatur dunia pendidikan. Di samping itu masih ada beberapa lembaga lain, yang secara langsung atau tidak langsung, mempunyai kekuatan untuk mengatur dunia pendidikan. Misalnya, DPR (yang menangani bidang pendidikan), Konsorsium pendidikan, Dewan Pertimbangan Pendidikan Nasional, POMG, Asosiasi Guru, Ikatan Alumni, dll. Para aktor pembuat kebijakan bertugas menyusun kebijakan sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Akan tetapi kebijakan tersebut seringkali tidak didasarkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah, bahkan seringkali suatu kebijakan berjalan hanya dengan metode trial and error tanpa didahului penelitian.

*Praktisi pendidikan :* Para praktisi pendidikan adalah mereka yang melaksanakan kebijaksanaan pendidikan (guru, kepala sekolah atau manager sekolah, penilik sekolah). Mereka sudah terlatih untuk melaksanakan pekerjaan rutin, sesuai dengan norma-norma, kode etik, dan peranan tradisional yang disandangnya, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Pelanggaran atau penyimpangan atas peranan tersebut dapat menyebabkan seorang pendidik dikucilkan atau disisihkan. Diantara para praktisi pendidikan belum tentu dapat bekerja secara harmonis, namun yang jelas guru umumnya lebih senang bilamana tugas mereka di kelas tidak dicampur aduk dengan pekerjaan administrasi lainnya. Mereka juga mengharapkan agar kepala sekolah tetap berfungsi sebagai pengawas dan menjaga

jarak. Di sini terlihat bahwa peranan guru-guru sangat penting dalam mensukseskan suatu kebijaksanaan pendidikan. Perihal kurang tertariknya guru-guru terhadap hasil-hasil penelitian memang sudah bukan rahasia. Tetapi mereka mempunyai beberapa alasan yang cukup rasional.

*Pertama-tama*, bila kita bandingkan sistim pendidikan dengan usaha *business*, jelas bahwa *persaingan pasar* memaksa para usahawan memperbaiki produk-produknya agar bisa *survive*, tetapi tidak demikian halnya dengan sistim sekolah. Seperti apa yang dikemukakan oleh Helen Walker, bahwa “*A school does not lose its pupils merely because it fails to teach them effectively. Most schools get their clients, not because of the action of a thoroughly dependable community force known as the birth rate*” (1957: 9-10). Umumnya para praktisi pendidikan di sekolah negeri lebih mengutamakan biaya produksi rendah dari pada meningkatkan konsumsi melalui perbaikan kualitas produknya.

*Alasan kedua* adalah karena *output sekolah yang relatif tidak kentara*, sehingga sukar mengevaluasinya. Jika dalam dunia *business* cara penilaian dapat ditentukan oleh tingkat keuntungan atau tingkat produktivitasnya; tidak demikian mudah halnya untuk mengukur sebuah organisasi yang pekerjaannya mengurus manusia. Meskipun mengukur kualitas pendidikan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun terdapat ketidaksepakatan tentang validitasnya, bahkan ada diantara peneliti yang merasa bahwa ukuran kualitas pendidikan yang bersifat umum tidak mungkin dilakukan. Kesukaran tersebut mungkin akan berlipat ganda manakala dilihat dari berbagai tujuan pendidikan: misalnya apakah tujuan pendidikan itu untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan ? untuk *academic attainment* ? untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan ? atau untuk tujuan lainnya ?

*Alasan ketiga* mengapa para praktisi sekolah negeri enggan memanfaatkan hasil-

hasil penelitian adalah karena ‘*skepticism* tentang nilai penelitian pendidikan’. Beberapa kritik yang sering dilontarkan para praktisi pendidikan antara lain adalah, bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan para ahli *mengabaikan* faktor-faktor ‘*crucial*’ di dalam kehidupan nyata; dan hasilnya sering dlebih-lebihkan dengan memanipulasi datanya. Kadang-kadang ada diantara hasil-hasil penelitian yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya; bahkan banyak pula diantara hasil-hasil penelitian yang tidak membawa implikasi praktis. Kritik lain yang sering dilontarkan adalah *kegagalan* melatih para peneliti dalam menyusun sasaran-sasaran penelitian; dan banyak pula diantara calon peneliti tidak diarahkan pada ‘pemecahkan masalah spesifik’ tetapi lebih banyak dibimbing kearah ‘pemahaman tentang proses-proses dasarnya saja’

Dari keseluruhan alasan tersebut, bila kita cermati, sebenarnya sumber penyebabnya adalah karena masih *kurang tersedianya ‘channel of communication’* yang teramat penting sebagai upaya *men-diseminasikan* hasil-hasil penelitian kepada para praktisi pendidikan. Media pendidikan yang tersedia, umumnya, masih sangat terbatas jenisnya terutama di lingkungan sekolah dasar dan menengah. Majalah atau buletin yang kadang-kadang beredar hanya berisi berita-berita ringan yang tidak berbeda dengan berita di koran atau di majalah umum. Yang diperlukan, sebenarnya, adalah media cetak berbentuk *jurnal* (pendidikan) atau *majalah ilmiah populer* yang ditulis dengan bahasa yang sederhana tetapi ilmiah -- mudah dicerna. Jadi sebenarnya, kekurangharmonisan antara para peneliti dengan para praktisi pendidikan sebenarnya tidak perlu terjadi.

### **Program-program strategis yang perlu diupayakan untuk mengembangkan kolaborasi**

Tugas para peneliti pendidikan adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang berbagai isu yang berkaitan dengan

pembangunan yang berkesinambungan, termasuk pembangunan pendidikan. Namun demikian, sebagaimana telah disinggung terdahulu, belum tentu penemuan-penemuan dalam penelitiannya akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan -- karena alasan tidak mendukung kebijaksanaan yang direncanakan. Yang jelas kedua komunitas tersebut belum dapat menjadi mitra yang harmonis, masing-masing mempertahankan argumennya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka tidak mungkin menemukan titik temu, *and never the twain shall meet*.

**Sisi Permintaan:** Dilihat dari sifatnya, proses pembuatan keputusan menghambat para pengambil kebijakan dalam mengekspresikan secara efektif permintaan terhadap penelitian. Penelitian yang baik sangat memerlukan definisi yang jelas tentang masalah dan variabel yang akan diukur. Tetapi sasaran kebijaksanaan dan program pemerintah cenderung didefinisikan *ngambang bahkan sering bertentangan*. Banyak keputusan dicapai melalui suatu proses tawar-menawar multilateral di mana amat sulit mencapai konsensus dan paling-paling yang bisa dicapai hanyalah berupa *statement-statement* yang prinsipil saja dan masih bersifat umum.

Karena keengganan untuk bertindak dan banyaknya prioritas yang dipertimbangkan, pemerintah cenderung baru akan mengubah kebijaksanaanya pada saat-saat terakhir. Dan bilamana hal tersebut yang terjadi, maka sudah terlambatlah untuk melakukan penelitian. Biasanya permintaan untuk penelitian terjadi manakala program dan *clientele* telah terbentuk. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sering terjadi *pelaksanaan suatu program mendahului penelitian*. Bahkan ada kalanya permintaan penelitian tidak diputuskan oleh lembaga tertentu saja, tetapi seringkali merupakan keputusan dari banyak pihak. Oleh karena itu manakala seorang peneliti diminta nasihatnya, audience-nya seringkali bukan pihak yang benar-benar memerlukan hasil-hasil penelitiannya.. Dan yang tidak kalah

pentingnya adalah bahwa pemerintah sering kebanjiran informasi yang tidak diperlukan.

**Sisi Penawaran:** Masalah juga muncul di dalam komunitas penelitian yang menyediakan informasi dan analisis. Penelitian di perguruan tinggi biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menyimpulkan hasil-hasilnya. Tidak jarang hasil-hasil penelitian tidak memberikan saran-saran untuk *action* bagi para pengambil keputusan, karena hasil-hasilnya menurut akademisi meragukan. Terkadang sang peneliti, sebagai akademisi, memberikan hasil-hasil yang saling bertentangan dari penelitian lainnya, dan sering sang *clientele* kecewa jika mengetahui dua penelitian yang kesimpulan hasilnya saling bertentangan.

*Di satu pihak*, akademisi mencari hukum-hukum dan pola yang bersifat umum yang akan mengungkap fenomena teori yang lebih besar dan sangat berguna di dalam jangka waktu lama dan bukan hanya sekedar hasil-hasil observasi khusus. *Di lain pihak*, para pengambil kebijakan menghendaki jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang bersifat spesifik (kecil dan khusus) yang sedang dihadapinya meskipun masalah tersebut tidak menarik bagi sang peneliti. Mereka cenderung menekankan segi pemerataan dari kebijakan, misalnya berapa individu yang akan memperoleh manfaat, sementara para ahli ekonomi -- para penasihat pemerintah -- lebih menitikberatkan pada segi efisiensi serta keuntungan dan kerugiannya secara finansial. Karena ketidakjelasan sasaran program, para *policy maker* cenderung menilai performance dari segi input dan bukan dari segi output (misalnya, jumlah tambahan kelas baru lebih penting daripada peningkatan mutu). Mereka juga selalu melihat atau mempertimbangkan dari sisi kerugiannya terlebih dahulu dibandingkan sisi keuntungannya. Sebab meskipun segi kerugian dan keuntungannya adalah seimbang belum tentu risikonya minimal, karena "*a policy that hurts five people and help five, produces five enemies and five ingrates*" (Verdier, 1984)

***Benturan yang perlu diantisipasi:***

Gap antara permintaan dan penawaran penelitian nampaknya cukup lebar. Tetapi pandangan ini mungkin terlalu pesimistik, sebab penggunaan definisi penelitian dan *policy impact*-nya terlalu sempit. Penelitian bukanlah sekedar sejumlah data, dan *policy impact*-nya pun mungkin saja berakumulasi tanpa batas, dengan berbagai pengaruhnya baru akan terasa setelah bertahun-tahun berlalu. Kontribusi penelitian (sosial dan pendidikan) dalam mengusulkan penyelesaian terhadap suatu isu atau masalah mungkin tidak begitu besar, dibandingkan dengan sumbangan dalam pendefinisian masalah-masalah dan dalam penyiapan sederetan konsep-konsep dan metode analisis. Masalah pendefinisian dapat berbentuk apa saja. Bisa berarti mendeteksi masalah dari pola-pola ke data, seperti misalnya mendeteksi kecenderungan semakin memburuknya gaji pegawai negeri. Bisa juga merubah pandangan masyarakat tentang berbagai isu. Sektor informal misalnya, kini tidak lagi dianggap sebagai gejala kemunduran suatu budaya, tetapi justru merupakan kekuatan potensial di dalam pembangunan. Perubahan perspektif tersebut adalah berkat penelitian-penelitian. Barangkali, kontribusi terbesar penelitian sosial dan pendidikan adalah dalam men-jenerasikan ide-ide dan ideologi-ideologi, sebagaimana sejarah telah pernah menunjukkan bahwa hal tersebut adalah merupakan kekuatan yang berpengaruh.

Selanjutnya, bagaimana para peneliti dan agen-agen yang menyepponsorinya seyogianya meningkatkan relevansi dan dampak sosialnya terhadap penelitian. Karena *problem solving* dan *conceptual impact*-nya keduanya sangat penting, maka program penelitian harus didisain untuk menyediakan keduanya dengan memupuk saling pengertian tentang hubungan-hubungan perilaku dasar dan pengetahuan yang lengkap tentang data. Hal itu dapat dipergunakan untuk menyiapkan advis kebijakan jangka pendek.

Para donatur juga memainkan peranan penting dalam mendukung penelitian-peneli-

tian teoritis, meskipun mereka enggan melakukan hal itu. Perbedaan antara teoriti dan empirik bukanlah seperti halnya perbedaan dikotomi antara bermanfaat dan tidak bermanfaat. Teori yang sudah teruji dan telah diverifikasi, adalah sangat berguna.

Perhatian yang lebih besar harus dicurahkan kepada publikasi hasil-hasil penelitian dan para sponsor harus siap membantu keuangan, misalnya untuk keperluan: konferensi, buku-buku, kertas kerja, abstraksi, atau semacam itu. Para peneliti harus mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian mereka dengan bahasa yang mudah difahami oleh para praktisi dan pembuat kebijakan yang akan menjabarkannya dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Beberapa rekomendasi penting bagi para pembuat kebijakan pendidikan adalah, antara lain,

1. Pelajari sejarah tentang isu-isu pendidikan dengan meneliti argumentasi-argumentasinya, *interest groups*-nya, area ketidaksepakatannya, dan celah-celah atau kelemahan di dalam datanya.
2. Adakan tukar pikiran (dengan fihak-fihak lain dan *peer group*-nya) sebelum keadaan atau kedudukan menjadi makin sulit diubah.
3. Jelaskan kelompok mana yang akan dipengaruhi dengan langkah-langkah yang akan diajukan dan diberikan saran cara mengkompensasinya, dan mana-mana yang terpengaruh secara negatif.
4. Jangan mengusulkan *action* berupa tindakan-tindakan yang secara teknis optimal tetapi terlalu kompleks dan memerlukan biaya tinggi bagi agen-agen atau para praktisi untuk melaksanakannya.
5. Usahakan agar suatu kebijaksanaan sesederhana mungkin. Tekankan pada keputusan yang telah siap, masalah-masalah yang sedang ditangani, dan pilihan-pilihan penyelesaiannya. Minimalkan metodologinya dan jargon-jargonnya.

## Penutup

Di jaman reformasi dan transformasi seperti sekarang, dimana penemuan-penemuan dan integrasi pengetahuan baru, informasi, dan teknologi sangat dinilai tinggi, penelitian kebijakan telah memainkan peranan yang penting di Indonesia. Bermilyar-milyar rupiah telah dialokasikan untuk melaksanakan penelitian yang berorientasi kebijakan tentang proses dan efek-efek reformasi pendidikan. Paling tidak, 10 IKIP yang didirikan sejak tahun 1960-an telah memiliki 10 lembaga penelitian (LP) yang aktif melakukan penelitian pendidikan dalam rangka membantu menyusun sistem pendidikan nasional yang lebih sesuai dengan kondisi sosio-budaya Indonesia. Namun demikian, sebagaimana disinggung di atas, hasil-hasil penelitian lembaga-lembaga tersebut umumnya masih dianggap kurang mendukung kebijaksanaan yang dirancang, sehingga akhirnya hasil-hasil penelitian dianggap tidak memadai jika dibandingkan dengan biaya penelitian yang telah dikeluarkan.

Untuk selanjutnya para peneliti pendidikan perlu melakukan pendekatan baru, bukan saja kepada para *policy makers* dan *decision makers*, tetapi juga harus lebih melibatkan para praktisi pendidikan sebagai mitra (bukan sebagai objek) kerja, dalam mendesain, melaksanakan, dan menganalisis penelitian-penelitiannya. Penggunaan ba-

hasanya pun diusahakan yang lebih komunikatif, dan sedapat mungkin menggunakan jargon-jargon yang sama dan sefaham.

Seyogyanya *research-based information* dalam bidang pendidikan lebih diarahkan dan berfungsi : (1) untuk menyiapkan kerangka umum yang mengarah pada pemikiran tentang kebijaksanaan; (2) pendefinisian suatu kebijaksanaan dan mengidentifikasi solusi-solusi yang potensial; (3) dan meng-*assess* kelaikan prospektus kebijakan-kebijaksanaan atau implementasi serta efek-efeknya atas suatu kebijaksanaan yang sedang berjalan.

## Daftar Bacaan

- Brickell, Henry M.**, 1961 *Organizing New York State for Educational Change*. Albany: New York State Education Department.
- Lazarsfeld, Paul F. and Sam D. Sleber**, N.D. *Problems of Educational Research*. In Ruths, James and J. Dresden Grambs (Eds) *Society and Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- McDonnel, Lorraine M.**, 1988. *Can Education Research Speak to State Policy? Theory into Practice*. Vol. XXVII, No.2, Spring
- Soendoro, R. Triono.**, 1995 *Reformasi Penelitian: Agenda Perencanaan Perubahan Menjelang Tahun 2000*. Perencanaan Pembangunan (Majalah Triwulanan) No. 03, Desember.
- Suwarno, Bambang dan Syaikhu Usman (Editor)**, 1997. *Pendidikan Tinggi Di Indonesia: Menyongsong PJPT-II* Monografi Kajian CPIS: Jakarta: Center for Policy and Implementation Studies.
- Walker, Helen**, 1957, *The preparation of Research Workers in Education*. *Elementary School Journal*, 58 (October, pp. 9-15).
- Verdier, James**, 1984. *Advising congressional decision makers: guidelines for economists*, *Journal of Policy Analysis and Management*, Vol. 3 (3) 421-428.